



TERM OF REFERENCE / KERANGKA ACUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ESELON I/II	:	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/ DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN
PROGRAM	:	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
HASIL (OUTCOME)	:	OPERASI BUS UNTUK MENDUKUNG KSPN BOROBUDUR
UNIT ESELON II/SATKER	:	BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III DIY
KEGIATAN	:	SUBSIDI ANGKUTAN ANTARMODA UNTUK MENDUKUNG KSPN BOROBUDUR
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	:	PELAYANAN PUBLIK LAINNYA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	SUBSIDI ANGKUTAN ANTARMODA UNTUK MENDUKUNG KSPN BOROBUDUR
SATUAN UKUR & JENIS KELUARAN	:	LAYANAN
VOLUME	:	1 (SATU)

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III D.I YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan lalu Lintas;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
- 8) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
- 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat NO. SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;

b. Gambaran Umum

Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh pada keberhasilan pembangunan diberbagai sektor. Semua sendi pembangunan akan sangat tergantung pada kinerja sektor transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kota-kota besar secara langsung meningkatkan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kebutuhan akan mobilitas dan pergerakan baik orang maupun barang dan secara langsung pula berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.

Bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit/BRT) yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan subsidi kepada angkutan Bus Rapid Transit (BRT) untuk Tahun 2024.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dan untuk menjamin kelangsungan pengoperasian pelayanan Angkutan Perkotaan, maka Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Perhubungan melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) pada anggaran tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran Subsidi Operasional Angkutan Perkotaan untuk melayani trayek Angkutan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana diharapkan dengan dioperasikannya Angkutan Perkotaan tersebut akan dapat memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pelayanan angkutan umum pada Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada jalur KSPN selama ini belum ada pelayanan angkutan umum untuk mendukung masyarakat dalam aktifitasnya. Dengan medan yang kurang mendukung serta rendahnya faktor muat pada daerah tersebut membuat swasta enggan menanamkan investasinya dalam rangka pelayanan transportasi pada daerah tersebut, namun bagaimanapun pelayanan transportasi merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah wajib menyediakan angkutan publik untuk kepentingan aktifitas publik.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kondisi yang padat penduduk, dan untuk kepentingan jalur transportasi dari KSPN membuat pada daerah tersebut di butuhkan fasilitas angkutan umum. Utamanya adalah daerah yang belum dilalui trayek angkutan umum karena aktifitas transportasi pada daerah tersebut kurang. Hal ini dapat menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dari permasalahan diatas dan dalam rangka ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pemerintah wajib menyediakan angkutan umum bersubsidi guna menjaga hak dan keberlangsungan aktifitas transportasi pada daerah tersebut.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

Subsidi Operasional Bus Untuk Mendukung Kspn Borobudur

b. Batasan Kegiatan

Subsidi Operasional Bus Untuk Mendukung Kspn Borobudur

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan adalah usulan Subsidi Subsidi Operasional Bus Untuk Mendukung Kspn Borobudur

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah menjamin pelayanan transportasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah Yogyakarta.

4. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a) Penyedia jasa harus memiliki jadwal terinci, time schedule, dan metode dalam rekapitulasi penumpang;
- b) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin ditimbulkan akibat kelalaian pengemudi dan kondektur;
- c) Penyedia Jasa harus menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d) Penyedia Jasa wajib melengkapi Tenaga Kerja dengan pakaian seragam dan tanda pengenal, serta bersedia memberikan asuransi tenaga kerja yang dituangkan dalam Surat Pernyataan;
- e) Pengguna Jasa berhak melakukan teguran/ peringatan secara lisan maupun tertulis apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pekerjaan jasa tersebut;
- f) Apabila penyedia jasa tidak mengindahkan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis tiga kali berturut-turut, maka pengguna jasa dapat membatalkan perjanjian dan menunjuk rekanan lain untuk menggantikan pelaksana kegiatan;
- g) Penyedia tidak diperkenankan mempekerjakan pegawai dibawah umur;
- h) Penyedia Jasa wajib membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan daftar kuantitas harga yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran, minimum sesuai dengan UMK Tahun 2024, dituangkan dalam Surat Pernyataan.

5. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Tersedianya Subsidi Angkutan Jalan Untuk Mendukung Kspn Borobudur

b. Keluaran

1) Subsidi Angkutan Jalan:

-	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – St. Tugu – Turi – Tempel – Borobudur	:	1 Trayek
-	Malioboro (Bank Indonesia) – Simpang Bakulan – Parangtritis	:	1 Trayek
-	Makam Raja-Raja Imogiri – Terminal Palbapang – YIA	:	1 Trayek
-	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – Tebing Breksi – Prambanan – Borobudur	:	1 Trayek
-	Malioboro (Bank Indonesia) – Gembira Loka - Siyono - Pantai Baron	:	1 Trayek
Jumlah Total		:	5 Trayek

6. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Satuan Kerja Perhubungan Darat D.I.Yogyakarta melaksanakan kegiatan pelelangan sederhana untuk menentukan pemenang yang akan menjadi pelaksana kegiatan

b. Penanggung jawab kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Satuan Kerja Perhubungan Darat D.I.Yogyakarta

- c. Penerima manfaat
Penerima manfaat adalah Pemerintah pusat Kementerian Perhubungan sebagai penyusun kebijakan, pemegang wewenang dan penyelenggaraan di bidang transportasi jalan dan masyarakat Yogyakarta

7. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Satker Perhubungan Darat DIY secara keseluruhan adalah selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Proses Lelang												
2	Kontrak												
3	Pelaksanaan Kegiatan												

8. SPESIFIKASI KENDARAAN

- Jumlah kendaraan minimal 16 dengan kapasitas 14 tempat duduk penumpang;
- Umur kendaraan minimal produksi tahun 2019;
- Setiap Kendaraan memiliki sertifikat laik jalan dari Instansi yang berwenang.
- Kendaraan khusus melayani rute layanan KSPN tidak melayani rute Komersial dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.

9. TENAGA TEKNIS

- Sopir sejumlah minimal 16 Orang, memiliki SIM B1 Umum;
- Tenaga Teknik minimal 1 Orang, dengan pendidikan minimal SMK Mesin;
- Tenaga Administrasi dan keuangan minimal 1 orang, dengan pendidikan minimal SMA;

10. PENGELOLAAN TEMPAT USAHA

- Menguasai Fasilitas penyimpanan/pool kendaraan dan/atau Bengkel;

11. KUALIFIKASI PENYEDIA

- Memiliki Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku
- Bidang Usaha dengan KBLI 4921 Angkutan Bus dalam trayek, dan Kualifikasi Usaha Non Kecil.
- Memiliki TDP atau NIB.
- Memiliki NPWP dan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Tahun pelaporan SPT 2022
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupamilik sendiri atau sewa

- f) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, Penyediaan jasa pada divisi (KBKI-64 Jasa Angkutan Penumpang)
- g) Penyediaan jasa sekurang kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, masuk pengalaman subkontrak; Penyedia jasa pada kelompok (grup)(KBKI 642 Jasa Transportasi atau Angkutan Penumpang Jarak Jauh

12. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan BPTD Kelas III D.I.Yogyakarta secara keseluruhan adalah selama 1 (satu) tahun anggaran.

13. PEMBIAYAAN

Total pembiayaan adalah sebesar **Rp 7.284.000.000,-** yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pekerjaan ini dirinci dan dijabarkan dalam lampiran.

Sleman, 16 Januari 2024

Mengusulkan :
Pejabat Pembuat Komitmen
BPTD Kelas III D.I Yogyakarta



Fatkhurohim, S.ST

NIP. 19920508 201801 1 002

REKAPITULASI PERHITUNGAN SUBSIDI KSPN-SKEMA BUNDLING-MULTI YEAR KENDARAAN BARU

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Trayek	Jumlah Rit Total Per Th	BPK (Rp/Pnp-Km)	LF (%)	Kap. (Seat)	Jarak/rit (km)	BPA per Rit (Rp.)	Profit Margin (Rp.)	Pajak (Rp.)	Tarif Dasar (Rp.)	Biaya Prod (Rp.)	Pendapatan (Rp.)	Subsidi (Rp.)
(1)	(2)	(3)=BOK(45)	(4)=BOK(46)	(5)=BOK(47)	(6)=Input BPTD(2)	(7)=Input BPTD(8)	(8)=(4)*(6)*(7)	(9)=BOK(51)	(10)=BOK(52)	(11)=BOK(53)	(12)=(8)+(9)+(10)	(13)=(5)*(6)*(7)*(11)	(14)=((12)-(13))*(3)
1	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – St. Tugu – Turi – Tempel – Borobudur	4,380	281.63	30%	14	98	386,392.52	38,639.25	-	186.00	425,031.77	76,557.60	1,526,316,854.00
2	Malioboro (Bank Indonesia) – Simpang Bakulan - Parangtritis	2,920	389.34	30%	14	58	316,145.56	31,614.56	-	186.00	347,760.11	45,309.60	883,155,497.43
3	Makam Raja-Raja Imogiri – Terminal Palbapang – YIA	2,920	353.33	30%	14	78	385,835.25	38,583.53	-	186.00	424,418.78	60,933.60	1,061,376,717.08
4	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – Tebing Breksi – Prambanan – Borobudur	2,920	254.34	30%	14	262	932,914.28	93,291.43	-	186.00	1,026,205.71	204,674.40	2,398,871,415.84
5	Malioboro (Bank Indonesia) – Gembira Loka - Siyono - Pantai Baron	2,920	296.44	30%	14	128	531,213.26	53,121.33	-	186.00	584,334.58	99,993.60	1,414,275,665.52
Total													7,283,996,149.87
Pembulatan													7,284,000,000.00



INPUT DATA TRAYEK KSPN

NAMA PROVINSI JUDUL REKAPITULASI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	DATA INPUT	SATUAN	FORMULA	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM0 – St. Tugu – Turi – Tempel – Borobudur	Malioboro (Bank Indonesia) – Simpang Bakun – Parangtritis	Makam Raja-Raja Imogiri – Terminal Palbapang – YAI	Malioboro (Bank Indonesia) – Titik KM 0 – Tebing Breksi – Prambanan – Borobudur	Malioboro (Bank Indonesia) – Gembira Loka – Siyono – Pantai Baron
I	ASUMSI							
1	Jumlah Armada Operasional	Unit	(1)	2	2	2	2	2
2	Kapasitas tempat duduk	Tempat Duduk	(2)	14	14	14	14	14
3	Jumlah hari dalam sebulan (rata-rata)	hari/bulan	(3)	30	30	30	30	30
4	Waktu operasi per-tahun	Hari/Tahun	(4)	365	365	365	365	365
5	Waktu perjalanan per rit	Jam/rit	(5)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	Jam operasional layanan perintis/hari	Jam/hari	(6)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
7	Jumlah rit per bus	Rit/hari	(7)	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	Panjang rute per rit (PP)	km/rit	(8)	98.0	58.0	78.0	262.0	128.0
9	Indeks Kemahalan Konstruksi		(9)	102.95	102.95	101.98	102.95	102.95
II	FAKTOR WILAYAH							
1	Panjang jalan tanah dalam satu rit	km/rit	(10)	-	-	-	-	-
2	Panjang jalan berbatu tajam dalam satu rit	km/rit	(11)	-	-	-	-	-
3	Panjang tanah basah/genangan air dalam	km/rit	(12)	-	-	-	-	-
4	Panjang jalan berdebu dan berpasir dalam	km/rit	(13)	-	-	-	-	-
5	Panjang jalan yang merupakan tanjakan dan	km/rit	(14)	-	-	-	-	-
III	POOL DAN BENGKEL							
1	Harga Satuan per bangunan fasilitas bengkel	Rp/m ²	(15)					
-2	Harga Satuan per bangunan kantor dan fasilitas	Rp/m ²	(16)					
				-				
IV	SUMBER DAYA MANUSIA							
1	Pramudi – jam kerja pramudi	jam	(17)	12	12	12	12	12
a	Gaji pokok	Rp/bulan	(18)	2,500,000				
b	Uang makan	Rp/hari	(19)	30,000				
c	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (persen gaji pokok)	% gaji pokok	(20)	7.70%				
d	Uang Dinas Jalan	Rp/bulan	(21)	-				
e	Diklat (training)	% gaji pokok	(22)	3%				
f	PPh	% gaji pokok	(23)	5%				
g	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(24)	500,000				
h	THR	pengali gaji pokok	(25)	-				
1	Kondektur	jam						
a	Gaji pokok	Rp/bulan	(26)	-				
b	Uang makan	Rp/hari	(27)	-				
c	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (persen gaji pokok)	% gaji pokok	(28)	0.00%				
d	Uang Dinas Jalan	Rp/bulan	(29)	-0%				
e	Diklat (training)	% gaji pokok	(30)	0%				
f	PPh	% gaji pokok	(31)	-				
g	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(32)	-				
h	THR	pengali gaji pokok	(33)					
2	Mekanik			2,500,000				
a	Gaji pokok	Rp/bulan	(34)					
b	Uang makan	Rp/hari	(35)	30,000				
c	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (persen gaji pokok)	% gaji pokok	(36)	7.70%				
d	Lembur	% gaji pokok	(37)	0%				
e	Diklat (training)	% gaji pokok	(38)	0%				
f	PPh	% gaji pokok	(39)	5%				
g	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(40)	500,000				
h	THR (berapa kali gaji pokok)	pengali gaji pokok	(41)	-				
3	Staf Admin, Keu, Ops							
a	Gaji pokok	Rp/bulan	(42)	2,500,000				
b	Uang makan	Rp/hari	(43)	30,000				
c	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (persen gaji pokok)	% gaji pokok	(44)	7.70%				
d	Lembur	% gaji pokok	(45)	0%				
e	Diklat (training)	% gaji pokok	(46)	0%				
f	PPh	% gaji pokok	(47)	5%				
g	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(48)	500,000				
h	THR (berapa kali gaji pokok)	pengali gaji pokok	(49)	-				
4	Tukang Cuci							
a	Gaji pokok	Rp/bulan	(50)	1,800,000				
b	Uang makan	Rp/hari	(51)	30,000				
c	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (persen gaji pokok)	% gaji pokok	(52)	7.70%				
d	Lembur	% gaji pokok	(53)	0%				
e	Diklat (training)	% gaji pokok	(54)	0%				
f	PPh	% gaji pokok	(55)	5%				
g	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(56)	-				
h	THR (berapa kali gaji pokok)	pengali gaji pokok	(57)	-				

5	Pimpinan Perusahaan								
a	Gajipokok	Rp/bulan	(58)	4,200,000					
b	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (p	%gajipokok	(59)	7.70%					
c	Diklat(training)	%gajipokok	(60)	0%					
d	PPh	%gajipokok	(61)	15%					
e	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(62)	500,000					
f	THR (berapa kali gaji pokok)	pengaligajipokok	(63)	-					
6	Manajer Teknik								
a	Gajipokok	Rp/bulan	(64)	4,200,000					
b	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (g	%gajipokok	(65)	7.70%					
c	Diklat(training)	%gajipokok	(66)	0%					
d	PPh	%gajipokok	(67)	15%					
e	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(68)	500,000					
f	THR (berapa kali gaji pokok)	pengaligajipokok	(69)	-					
7	Manajer Umum								
a	Gajipokok	Rp/bulan	(70)	4,200,000					
b	BPJS Kesehatan+BPJS Tenaga Kerja (g	%gajipokok	(71)	7.70%					
c	Diklat(training)	%gajipokok	(72)	0%					
d	PPh	%gajipokok	(73)	15%					
e	Pakaian dinas (harga 1 stel)	Rp/stel	(74)	500,000					
f	THR (berapa kali gaji pokok)	pengaligajipokok	(75)	-					
V	OPERASIONAL KANTOR DAN BENGKEL								
1	Jumlah Fasilitas Kantor dan Bengkel								
a	Telepon (jumlah line)	jumlah line	(76)	1					
b	Listrik (jumlah line)	sambungan	(77)	1					
c	Air (PDAM) (jumlah line)	sambungan	(78)	1					
d	Mesin fotocopy	unit	(79)	1					
e	Dispenser air minum (biaya per bulan)	unit	(80)	1					
f	Bahan habis pakai (jumlah paket)	paket	(81)	1					
2	Harga Satuan Fasilitas Kantor dan Bengkel								
a	Telepon (biaya per bulan)	Rp/line/bulan	(82)	500,000					
b	Listrik (biaya per bulan)	Rp/sambungan/bulan	(83)	3,000,000					
c	Air (PDAM) (biaya per bulan)	Rp/bulan	(84)	500,000					
d	Mesin fotocopy (biaya per bulan)	Rp/bulan	(85)	-1,000,000					
e	Dispenser air minum (biaya per bulan)	Rp/bulan	(86)	-					
f	Bahan habis pakai (biaya per bulan)	Rp/bulan	(87)	-					
3	Jumlah Kendaraan operasional (Sepeda Motor)								
a	Jumlah kendaraan (unit)	unit	(88)	-					
b	Bahan bakar (liter per hari)	-liter/hari	(89)	-					
4	Harga Satuan Kendaraan operasional (Sepeda Motor)								
a	Operasional kendaraan (sewa kendaraan)	Rp/bulan	(90)	-					
-b	Harga bahan bakar - subsidi atau non subsidi	Rp/liter	(91)	-					
5	Sistem komunikasi (berbasis GPS)	Rp/kendaraan/bulan	(92)	-					
VI	PERALATAN								
1	Harga satuan sewa kendaraan operasional	Rp/unit/tahun	(93)	-					
2	Harga satuan penyediaan peralatan kantor	Rp/paket/tahun	(94)	-					
3	Harga satuan penyediaan sistem komunikasi	Rp/paket/tahun	(95)	-					
VII	PERHITUNGAN BOK								
1	Harga BBM Bus - Subsidi/Non Subsidi	Rp/liter	(96)	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
2	Biaya Keur Bus/pengujian	Rp/pengujian	(97)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
3	Biaya Asuransi (TLO) Bus/tahun	Rp/tahun	(98)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
4	Biaya PKB Bus/tahun	Rp/tahun	(99)	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
5	Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar Bus	liter/kilometer	(100)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
6	Persentase keuntungan (profit margin 10%)	%	(101)	10.0%					
7	Persentase pajak (PPN)	%	(102)	0.0%					
8	Tarif Dasar	Rp/km/pnp	(103)	186	186	186	186	186	186
9	Load Factor Hitung Subsidi	%	(104)	30%	30%	30%	30%	30%	30%
10	Biaya Perjalanan Dinas	Rp/tahun/paket kontrak	(105)	24,900,000					
11	Biaya Publikasi	Rp/tahun/paket kontrak	(106)	22,000,000					
12	Biaya Terminal	Rp/rit	(107)	-	-	-	-	-	-
13	Biaya Pertinjan (Kartu Pengawasan)	Rp/tahun	(108)	--					
14	Biaya Penyeberangan	Rp/rit	(109)	500,000,000	-500,000,000	-500,000,000	-500,000,000		
15	Harga kendaraan	Rp/bus	(110)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	500,000,000	
16	Sukubunga	%	(111)	-0.0%	-	-	-	0.0%	
17	Masa penyusulan	tahun	(112)	0.0%					
18	Persentase residu	%	(113)	5					
19	Persentase pinjaman	tahun	(114)	0.0%	5	5	5		
20	Masa pinjaman	tahun	(115)						5
21	Persentase provisi selama pinjaman	%	(116)						
22	Biaya Tol	Rp/rit	(117)	-	-	-	-	-	-
-23	Biaya konsesi dan sewa booth di simpul trans	Rp/tahun/paket kontrak	(118)	-	-	-	-	-	-
24	Biaya parkir di simpul transportasi	Rp/rit	(119)	-	-	20,000	-	-	-
25	Biaya parkir di destinasi wisata	Rp/rit	(120)	-	10,000	-	-	-	10,000